

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK

Hasna Ulayya Nawangsari, Dewi Rostyaningsih, Hesti Lestari

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Demak Regency is one of the regions that is not spared from waste problems. The waste issues in Demak Regency consist of high population growth, lack of community participation, rampant use of single-use plastic in the form of packaged drinks, landfill sites still used for open dumping, limited human resources, limited budget, and limited fleet. Based on these issues, the central government has directed each region to formulate regional policies and strategies as guidelines for the implementation of household waste and similar waste management. This research aims to analyze the implementation of the regional policies and strategies, as well as identify factors that influence the implementation of these regional policies and strategies in waste management in Demak Regency. This research employed a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation. The results demonstrate that the implementation of the regional policies and strategies in waste management in Demak Regency has not yet achieved the right policy, right implementer, right target, and right process. This is due to ongoing issues such as the increasing use of plastic in the form of packaged drinks, limited human resources, limited budget, limited infrastructure, lack of private sector involvement in waste reduction, and lack of community participation. The recommendation given is that the Environmental Agency needs to re-evaluate the implementation of the regional policies and strategies in waste management, improve work patterns, enhance cooperation between the government and the private sectors in waste reduction, and maximize community empowerment.*

**Keywords :** *Implementation, Policy, Strategy, Waste Management*

## **PENDAHULUAN**

Hampir semua negara di dunia mempunyai persoalan tersendiri pada negaranya masing-masing. Persoalan yang dihadapi oleh setiap negara pun ada banyak jenisnya, contohnya masalah kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Di negara Indonesia masalah lingkungan

masih menjadi masalah utama yang belum teratasi, seperti salah satunya yakni masalah sampah. Sampah ialah segala hal yang tidak terpakai, tidak disukai, bahkan perlu dibuang, serta sampah berasal dari aktivitas penduduk (Hardiyanti & Ari, 2019).

Di tahun 2017 melewati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah menerbitkan suatu rancangan strategis sebagaimana tertera pada PP 97/2017 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” yang selanjutnya disebut Jakstranas. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah daerah harus menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) tidak terkecuali di Kabupaten Demak. Jakstrada di Kabupaten Demak tertuang pada Peraturan Bupati Demak 58/2018 tentang “Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut sebagai arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Demak merencanakan pembangunan dua pengolahan sampah. Di tahun 2024 akan dibangun pengolahan sampah plastik yang dibuat untuk pemecah gelombang atau APO. APO adalah sejenis cetakan yang akan diolah dari sampah plastik dan akan dicampur dengan beton untuk mengatasi rob yang ada di Desa Timbulsloko. Sementara pada akhir tahun 2023 akan dibangun rumah maggot yang terletak di

Desa Tempuran. Desa Tempuran adalah salah satu desa di Kabupaten Demak yang mendapat bantuan serta menjadi percontohan desa mandiri sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan pihak implementor dalam penyelenggaraan Peraturan Bupati 58/2018. Di dalam penyelenggaraannya, Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus pada mengurangi sampah dan menangani sampah. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan ini bertujuan dalam rangka persoalan sampah yang ada pada Kabupaten Demak dapat diatasi dengan maksimal namun nyatanya implementasi kebijakan ini belum optimal akibat beberapa masalah. Permasalahan yang paling utama berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Demak terus mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 – 2022. Berikut data yang ditemukan :

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak (Tahun 2019 – 2022)**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1.	2019	1.162.805 jiwa
2.	2020	1.203.956 jiwa
3.	2021	1.212.377 jiwa
4.	2022	1.223.217 jiwa

Sumber : BPS Kabupaten Demak

Berdasarkan tabel 1 yang didapat melalui *website* BPS Kabupaten Demak, dapat

dilihat bahwa penduduk Kabupaten Demak dari tahun 2019 ke tahun 2022 semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat pesat serta bentuk konsumsi masyarakat yang seringkali berubah, berimplikasi terhadap adanya persoalan mengenai sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berarti bahwa masyarakat terlibat secara sukarela dan aktif dalam seluruh proses pengelolaan sampah (Armadi, 2021). Namun, faktanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang hal ini dapat dilihat pada gambar 1.

**Gambar 1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat**



Sumber : Observasi Lapangan, 2023

Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang, meskipun sudah ada kontainer bak sampah tetapi masyarakat masih membuang sampah diluar kontainer bak sampah. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Bapak Eko

Pringgolaksito dalam Tribunjateng (24/6/2023) terkait DLH Demak turunkan sibersampah untuk atasi penumpukan sampah sembari edukasi masyarakat yang mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan padahal sudah disediakan tempatnya.

Permasalahan es jumbo yang sedang marak saat ini dapat memperparah permasalahan sampah plastik. Berdasarkan observasi penulis, di sepanjang jalan di Kabupaten Demak banyak dijumpai pedagang es jumbo yang mengemas menggunakan kemasan gelas plastik sekali pakai. Hal tersebut dapat berpotensi menambah gunung sampah plastik di TPA Berahan Kulon. TPA Berahan Kulon merupakan TPA yang berdiri pada tahun 2021 yang rencana awal pembangunannya diarahkan menjadi TPA modern dengan sistem *sanitary landfill*. Hal ini dukung oleh pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapal Agus Musyafak (22/03/2021) yang mengatakan rencanya TPA baru dengan luas 25.05 hektare akan menjadi TPA modern dengan *sanitary landfill* yaitu sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Namun pada kenyataanya TPA Berahan Kulon hingga saat ini masih menggunakan sistem *open dumping* karena keterbatasan anggaran.

**Gambar 2. TPA Berahan Kulon**



Sumber : Observasi Penulis, 2023

Pengangkutan sampah di Kabupaten Demak menggunakan kontainer dilaksanakan 1 *shift* menuju TPA Berahan Kulon. Dinas Lingkungan Hidup belum bisa melayani pembuangan siang dan malam dikarenakan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Hal ini didukung oleh pernyataan Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas (18/09/2023) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas sekali menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa melayani 1 *shift* pembuangan belum bisa melakukan *shift* siang dan malam sedangkan armada yang dimiliki armada amrol hanya 8, *drum truck* 3, dan kol 1 serta kondisi armada ada yang cukup tua umurnya sehingga menyebabkan berbagai kendala.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah**

**(Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak.
2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak.

## **KERANGKA TEORI**

### **Adminisrasi Publik**

Pengertian administrasi publik menurut beberapa ahli :

1. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf publik untuk menformulasikan, menerapkan, dan mengelola (mengawasi) berbagai keputusan kebijakan publik.

2. Administrasi Publik menurut Nigro dan Nigro (dalam Keban, 2014) adalah usaha kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang terdiri dari tiga cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki peran penting untuk memformulasikan kebijakan publik, hingga menjadi bagian dari proses politik; yang berbeda dengan beberapa cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; serta berkenaan dengan kelompok - kelompok swasta dan individu dalam pemberian layanan terhadap masyarakat
3. Administrasi publik didefinisikan oleh Barton & Chappel (dalam Keban, 2014) sebagai pekerjaan pemerintah atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berkenaan dengan menekankan aspek keterlibatan individu dalam memberikan layanan publik.
4. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) administrasi publik adalah gabungan teori dan praktik yang rumit yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman berkenaan peran pemerintah dalam masyarakat yang diperintahkan dan mengubah kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan pengertian dari para ahli sebagaimana sudah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi

publik adalah proses koordinasi yang berhubungan terhadap pelaksanaan kebijakan publik agar dapat mencapai tujuan kenegaraan.

### **Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Nicholas Henry (dalam Thoha, 2008) mengatakan bahwa terdapat krisis definisi administrasi negara sehingga perlu memhami lebih jauh tentang administrasi negara melalui paradigma. Paradigma dalam administrasi negara terdiri dari :

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik – administrasi (19-- - 1926)
2. Paradigma 2 : Prinsip – prinsip administrasi (1927 – 1937)
3. Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)
4. Paradigma 4 : Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
5. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970)

Berdasarkan beberapa paradigma administrasi publik dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan menyesuaikan persoalan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bagian paradigma 5 yang menjelaskan mengenai persoalan-persoalan masyarakat.

### **Kebijakan Publik**

James Anderson (dalam Nugroho, 2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku yang cenderung stabil dan mempunyai tujuan yang akan

diselenggarakan oleh aktor maupun sekelompok aktor untuk menghadapi permasalahan maupun persoalan yang menjadi fokus perhatian.

Menurut AG. Subarsono (dalam Raintung et al., 2022) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah ataupun pejabat publik dalam sektor tertentu, seperti sektor pertahanan, industri, pertanian, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya.

Dye (dalam Muadi et al., 2016) mengatakan bahwa kebijakan negara sebagai apapun keputusan yang dipilih pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Hal ini, apabila pemerintah memilih untuk melaksanakan sesuatu perlu ada tujuannya dan bersikap objektif mencakup seluruh indakan pemerintah. Pendapat tersebut sejalan dengan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri, 2022) sebagaimana memaknai kebijakan publik adalah apa yang diutarakan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statemen* yang berbentuk pidato pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah untuk segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”

Pengertian lain kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dun (dalam Raintung et al., 2022) mengatakan bahwa dalam buku yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”, merumuskan kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Sedangkan menurut Islamy (dalam Anggara, 2012) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan keputusan baik yang akan dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang berfokus pada tujuan tertentu untuk kepentingan semua masyarakat

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak dari pemerintah untuk meraih tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **Proses Kebijakan Publik**

Nicholas Henry (dalam Suwitri, 2022) menyatakan bahwa dalam mempelajari kebijakan publik juga melihat dari sudut proses di mana proses adalah suatu kegiatan yang memiliki tahapan tahapan dari tahap awal hingga tahap akhir. Di dalam proses kebijakan publik Garry D Brewer (dalam Suwitri, 2022) menyusun menjadi 6 tahapan sebagai berikut :

1. *Invention/Initiation*, yaitu tahap perumusan masalah.
2. *Estimation*, yaitu tahap pengusulan alternatif-alternatif.
3. *Selection*, yaitu alternatif-alternatif yang tersedia diseleksi dan dinilai untuk dipilih yang terbaik.
4. *Implementation*, yaitu tahap aplikasi sesudah kebijakan publik mendapat pengesahan
5. *Evaluation*, yaitu kebijakan dinilai terlebih dahulu.
6. *Termination*, yaitu penyesuaian kebijakan.

Menurut Purwanto & Dyah, (2015) tahapan implementasi bagian proses kebijakan publik dalam merealisasikan tujuan dari kebijakan. Tahap implementasi seringkali dinyatakan menjadi tahap krusial karena tahap ini sebagai “jembatan” dari realita dengan konsep sebagaimana pendapat Grindle (dalam Purwanto & Dyah, 2015) yang menyebutkan bahwa implementasi yang dimaksud adalah konsep yang tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Dunia nyata adalah realitas masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang berperang dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik.

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya “*Public Policy*” mengemukakan terdapat 5 tepat yang harus dipenuhi berkaitan dengan keefektifan implementasi kebijakan yang terdiri dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, serta ketepatan proses. Menurut Zainal Abidin (2019) keberhasilan implementasi kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor – faktor pendukung sedangkan faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak – pihak terkait.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian dilakukan di Kabupaten Demak. Informan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan informan antara lain Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Koordinator TPA Berahan Kulon, serta Masyarakat Kabupaten Demak. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan Interpretasi data dilakukan melalui pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh akan diperiksa kebenarannya menggunakan teknik triangulasi sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak**

Menurut Riant Nugroho (2014) terdapat 5 tepat yang harus dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan diantaranya ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, serta ketepatan proses.

#### **A. Ketepatan Kebijakan**

Menurut Nugroho (2014) ketepatan kebijakan berkaitan dengan apakah kebijakannya sendiri telah tepat yang dinilai dari seberapa jauh kebijakan yang ada telah mencakup berbagai hal yang sebenarnya memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

Implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak belum tepat, kebijakan ini terdapat permasalahan karena belum sepenuhnya memecahkan masalah persampahan di Kabupaten Demak. Hal ini dilihat dari penggunaan plastik berupa minuman kemasan yang semakin marak dapat menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat, TPA menggunakan sistem *open dumping*, keterbatasan sumber daya

manusia, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan sarana prasarana.

#### **B. Ketepatan Pelaksana**

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Bessiar, 2020) proses implementasi tidak hanya melibatkan satu aktor saja, melainkan banyak aktor. Selanjutnya menurut Nugroho, (2014) ketepatan pelaksana berkaitan dengan tiga institusi yang bisa berperan sebagai pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Ketepatan pelaksana ini dengan melihat pertama yaitu aktor implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua adalah keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melaksanakan kebijakan.

Ketepatan pelaksana dalam penelitian ini adalah melihat ketepatan dan keterlibatan aktor yang berperan di dalam implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Aktor dalam kebijakan ini terdiri dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, serta swasta.

Implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak pada ketepatan pelaksana belum tepat. Hal ini dilihat dari arah kebijakan pengurangann sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

belum mempunyai keterlibatan dengan swasta.

### **C. Ketepatan Target**

Menurut Nugroho, (2014) ketepatan target mempunyai keterkaitan atas tiga hal diantaranya pertama, apakah target yang diintervensi selaras dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak berlawanan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target berada pada situasi yang siap dilakukan intervensi atau tidak. Kesiapan tidak hanya dalam arti secara alami, tetapi juga terkait apakah kondisi sasaran ada dalam konflik atau harmoni, serta apakah keadaan target ada dalam situasi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi terkait implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Target/sasaran implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak yaitu masyarakat Kabupaten Demak. Pada ketepatan target dinilai belum tepat, karena dilihat dari arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga pada sub indikator sasaran kebijakan dan kesiapan sasaran kebijakan yang dilaksanakan oleh masyarakat belum berjalan dengan baik. Pada sub indikator kondisi kebijakan, Jakstrada harus dijalankan sesuai rencana

karena Jakstrada melanjutkan kebijakan sebelumnya.

### **D. Ketepatan Lingkungan**

Menurut Nugroho, (2014) ketepatan lingkungan ditinjau melalui lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan interaksi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait lainnya yang mempunyai hubungan sedangkan lingkungan eksternal berkenaan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, seperti berbagai individu tertentu yang bisa memainkan peran penting untuk menerapkan kebijakan.

Ketepatan lingkungan pada pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah sudah tepat, karena dilihat dari arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga pada sub indikator lingkungan internal dan lingkungan eksternal telah terjalin interaksi dengan baik. Pada sub indikator lingkungan internal terdapat interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan Organisasi Perangkat Daerah sedangkan pada sub indikator lingkungan eksternal terdapat interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran utama memiliki peran penting dalam kebijakan ini.

## **E. Ketepatan Proses**

Menurut Tumanggor & Slamet, (2019) tepat proses merupakan suatu kebijakan yang dilakukan sesuai dengan proses yang sudah ditentukan. Selanjutnya menurut Nugroho, (2014) ketepatan proses mencakup tiga proses yang berkaitan pertama, *policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, *strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak pada ketepatan proses belum tepat, karena terdapat hambatan pada sub indikator pemahaman, penerimaan, kesiapan para pelaksana berupa para pelaksana belum sepenuhnya memahami, menerima, dan siap terhadap pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

## **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak**

Menurut Said Zainal Abidin (2019) keberhasilan implementasi kebijakan

mempunyai dua faktor utama yang mempengaruhi yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal dan faktor utama eksternal pada implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak dapat sebagai pendorong dan penghambat.

### **A. Faktor Utama Internal**

Faktor utama internal adalah hal-hal yang berasal dari kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor – faktor pendukung, seperti pertama, faktor penghambat pada ketepatan kebijakan masih mengalami hambatan meliputi penggunaan plastik, TPA *open dumping*, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang terbatas. Berkaitan dengan hal ini ditemukan juga di dalam penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, Faizal, Titi (2021), ditemukan hambatan pada pelaksanaannya yang masih belum berjalan sesuai harapan karena kebijakan ini masih terbatas pada sumber daya manusia yang ahli di bidang persampahan, fasilitas yang masih kurang, kendaraan pengangkut sampah masih kurang, serta anggaran dana operasional dalam bidang pengelolaan sampah yang masih kurang. Kedua, faktor pendorong pada ketepatan lingkungan, pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak yang dilihat dari arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah

rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga telah berjalan komunikasi dengan baik. Adanya komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup bersama Organisasi Perangkat Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Demak. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan terdiri dari 6 variabel yang saling berkaitan, salah satunya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

### **B. Faktor Utama Eksternal**

Faktor utama eksternal adalah hal-hal yang berasal dari kondisi lingkungan (*environment*) dan dan pihak – pihak terkait (*stakeholders*), seperti faktor penghambat pada ketepatan pelaksana, pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah yang dilihat dari arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga belum mempunyai keterlibatan dengan swasta. Kedua, faktor penghambat pada ketepatan target, pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak yang dilihat dari arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga ditemukan hambatan pada ketepatan target

yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Menurut Saputra et al., (2022) menjelaskan pentingnya partisipasi dalam mengurangi dan menangani sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang semakin hari semakin meningkat. Ketiga, faktor pengambat pada ketepatan proses, pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak yang dilihat dari arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga ditemukan hambatan pada ketepatan proses berupa kurangnya pemahaman, penerimaan, kesiapan dari masyarakat sebagai salah satu pelaksana kebijakan. Fenomena ketepatan proses berkaitan dengan fenomena sikap atau kecenderungan (*disposition*). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) yang menjelaskan terkait sikap dari penolakan maupun penerimaan yang mungkin dapat terjadi dari para pelaksana dan hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yang diselenggarakan bukan sebagai bentuk perolehan dari masyarakat sekitar yang paham betul terkait persoalan di daerah mereka.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya belum optimal, walaupun ada aspek yang telah berjalan dengan baik dan sesuai. Aspek – aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak, yakni mengenai ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, serta ketepatan proses. Di dalam aspek ketepatan lingkungan sudah berjalan baik dan sesuai dengan pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

Hal yang dianggap belum sesuai, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan adalah pada fenomena ketepatan kebijakan, pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya memecahkan masalah permasalahan di Kabupaten Demak. Fenomena ketepatan pelaksana sebenarnya semua aktor telah menjalankan perannya masing – masing, tetapi pada tahap pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum ada keterlibatan swasta. Ketepatan target

sebenarnya sudah sesuai, yaitu masyarakat Kabupaten Demak, tetapi pada sub indikator sasaran kebijakan dan kesiapan sasaran kebijakan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik sedangkan pada sub indikator kondisi kebijakan, Jakstrada harus dijalankan sesuai rencana karena Jakstrada melanjutkan kebijakan sebelumnya. Pada fenomena ketepatan proses belum sepenuhnya para pelaksana memahami, menerima, dan siap terhadap pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi sebagai pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Pada implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak pada faktor utama internal ditemukan pendorong, seperti komunikasi serta penghambat, seperti penggunaan plastik yang semakin marak berupa minuman kemasan, TPA yang masih *open dumping*, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, kurangnya sarana prasarana. Pada faktor utama eksternal ditemukan penghambat,

seperti kurangnya keterlibatan swasta pada tahap pengurangan sampah, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman, penerimaan, kesiapan masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan implementasi kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak agar program yang telah disusun dapat lebih dimaksimalkan lagi.
2. Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan implementasi kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut :
  - a) Dinas Lingkungan Hidup perlu memperbaiki pola kerja, seperti melakukan penambahan jumlah staf pada Badan Dinas maupun petugas di lapangan dengan memperhatikan kualitas dan kompetensi dari staf; mencari anggaran lain, seperti melalui bantuan dari pemerintah pusat; serta menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan dan strategi daerah

(Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

- b) Perlunya meningkatkan kerjasama antara pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan swasta agar pelaksanaan pada tahap pengurangan sampah juga dapat berjalan dengan lebih maksimal.
- c) Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan implementasi kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2020). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revi). Bandung : CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Armadi, N. M. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9–24. <https://doi.org/10.52318/jisip.2021.v35.1.2>
- Bessiar, M. (2020). Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Putussibau. *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41512>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. (2021). TPA Berahan Kulon Diharapkan Atasi Masalah Sampah di Demak. Dalam <https://dinkominfo.demakkab.go.id/be>

- rita/detail/tpa-baru-diharapkan-dapat-mengatasi-permasalahan-sampah-di-demak. Diunduh pada Tanggal 19 Desember 2023.
- Hardiyanti, K., & Ari, S. (2019). Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 1–15.
- Hastuti, B. D., Faisal, A., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Keban, Y. . (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Elek Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Purwanto, E. A & Dyah, R. . (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Raintung, B. T. Y., Fanley, P., & Monintja, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado (Studi Di Kecamatan Sario). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–10.
- Saputra, T., Nurpeni, N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S. R., Eka, E., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8073>
- Suwitri, S. (2022). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Tumanggor, P. I. J., & R Slamet Santoso. (2019). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 339–364
- Utama, T. I. (2023) DLH Demak Turunkan Sibersampah Untuk Atasi Penumpukan Sampah Sembari Edukasi Masyarakat. *TribunJatengcom*. Dalam <https://jateng.tribunnews.com/2023/06/24/dlh-demak-turunkan-sibersampah-untuk-atasi-penumpukan-sampah-sembari-edukasi-masyarakat>. Diunduh pada Tanggal 19 Desember 2023.